



BAPPELITBANG
KABUPATEN TAPIN



LAPORAN AWAL KAJIAN STRATEGI

PENINGKATAN ANGKA
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
DI KABUPATEN TAPIN

2023



©r.ie84

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

©Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tapin

 @estarlitbang_tapin

 www.e-starlitbang.tapinkab.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Dengan pendidikan yang sungguh-sungguh diarahkan pada pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terhormat, unggul, dan diperhitungkan dalam pergaulan dan persaingan dunia.

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Sementara itu, pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan merupakan landasan bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pendidikan juga merupakan kunci dalam mengembangkan pengetahuan dan kualitas kemampuan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan yang berperan dalam menentukan kualitas pendidikan.

Indikator keberhasilan pendidikan yang diukur dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, menunjukkan belum optimalnya pendidikan di Kabupaten Tapin. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan indikator tersebut. Dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Tapin, melalui kajian ini disusun strategi untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Laporan Pendahuluan ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, gambaran wilayah Kabupaten Tapin, serta rencana pelaksanaan kerja. Melalui kajian ini diharapkan pemerintah daerah dapat merefleksikannya dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin.

Rantau, 12 Desember 2023

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan, Kabupaten Tapin**



Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19840522 200803 1 0001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.3.1. Lingkup Waktu	2
1.3.2. Lingkup Wilayah	2
1.3.3. Lingkup Substansi	2
1.4. Keluaran	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	4
2.2. RLS dan Performa Ekonomi Daerah	6
2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS	7
BAB 3 METODE PENELITIAN	10
3.1. Metode dan Pendekatan	10
3.2. Unit Amatan	10
3.3. Unit Analisis	11
3.4. Metode Pengumpulan Data	11
3.5. Metode Analisis Data	12
3.6. Desain Penelitian	14
BAB 4 GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN TAPIN	16
4.1. Kondisi Geografis Wilayah	16
4.1.1. Kondisi Topografi	19
4.1.2. Kondisi Klimatologi	19
4.1.3. Jenis Tanah	19
4.1.4. Kondisi Hidrologi	20
4.1.5. Guna Lahan	20
4.2. Demografi	20
4.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk	21
4.2.2. Kepadatan Penduduk	21
4.2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan	22
4.2.4. Penduduk Angkatan Kerja	22
4.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	23
4.2.6. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	24
4.2.7. Indeks Pembangunan Manusia	24

4.3.	Kondisi Pendidikan	26
4.3.1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	26
4.3.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	27
4.3.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	28
4.3.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	29
4.3.5.	Angka Partisipasi Murni (APM)	29
4.3.6.	Angka Putus Sekolah	30
4.3.7.	Fasilitas Pendidikan	31
4.3.8.	Akreditasi Sekolah	33
4.3.9.	Rasio Tenaga Pendidik	33
4.4.	Kondisi Ekonomi	33
4.4.1.	PDRB Kabupaten Tapin	33
4.4.2.	Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin	34
4.4.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	36
4.4.4.	Indeks Gini	37
4.4.5.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin	38
4.5.	Kondisi Sosial	38
4.5.1.	Budaya Masyarakat	39
4.5.2.	Jumlah Penduduk Miskin	39
4.5.3.	Gap antar Kelompok Pengeluaran	40
BAB 5	RENCANA PELAKSANAAN KERJA	42
5.1.	Tahapan Pelaksanaan	42
5.2.	Pelaporan	43
5.3.	Jangka Waktu Pelaksanaan	43
5.4.	Mobilitas Tenaga	44

DAFTAR TABEL

2.1	Konversi Ijazah Terakhir menjadi lama sekolah (tahun)	6
3.1	Kebutuhan dan Metode Pengumpulan Data	13
4.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapin	16
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin	21
4.3	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	26
4.4	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	27
4.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin	28
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin	29
4.7	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin	30
4.8	Jumlah APS dan ATS di Kabupaten Tapin	31
4.9	Jumlah Fasilitas Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tapin	32
4.10	Fasilitas Pendidikan Sekolah Informal di Kabupaten Tapin 2023	32
4.11	Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin	35
4.12	Indeks Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Selama 5 Tahun	37
4.13	Persentase Penduduk berdasarkan Kelompok Pengeluaran Dilihat dari Kelompok Umur, Kemampuan Membaca dan Kepemilikan Ijazah	41
5.1	Rencana Jadwal Pelaksanaan Kerja	43



DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS	8
3.1	Tahapan Penelitian	13
3.2	Bagan Penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah	15
4.1	Peta Administrasi Kecamatan	17
4.2	Peta Administrasi Kelurahan dan Desa	18
4.3	Piramida Penduduk Kabupaten Tapin	22
4.4	Grafik Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	23
4.5	IPM Kabupaten Tapin	24
4.6	Grafik Perbandingan IPM	25
4.7	Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional	26
4.8	Grafik Rata-rata Lama Sekolah	27
4.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin se Provinsi Kalimantan Selatan	36
4.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten se Provinsi Kalimantan Selatan	36
4.11	Grafik Indeks Gini se-Kalimantan Selatan	37
4.12	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	38
4.13	Kondisi Pernikahan Dini di Kabupaten Tapin Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	39
4.14	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Tapin/Kota di Kalimantan Selatan	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu keberhasilan pembangunan, dapat diukur melalui pencapaian pembangunan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 69,53 pada tahun 2018 menjadi 71,02 pada tahun 2022, namun masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2019).

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan lamanya masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa mendatang.

Sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan di Kabupaten Tapin, rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2022 menunjukkan angka 7,95 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, data harapan lama sekolah menunjukkan angka 12,04 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau D1. Data rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah Kabupaten Tapin menunjukkan perkembangan yang lambat setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang bagaimana strategi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Tapin.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin adalah:

1. Melakukan analisis kondisi eksisting pendidikan penduduk Kabupaten Tapin
2. Menganalisis tipologi wilayah sebaran sarana prasarana pendidikan (sekolah, guru, dan murid)
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Tapin
4. Menyusun strategi dan rekomendasi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Tapin

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.1. Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan kajian ini dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) bulan.

1.3.2. Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tapin yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 135 Desa/Kelurahan.

1.3.3. Lingkup Substansi

Kegiatan penyusunan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin ini meliputi:

1. Analisis kondisi eksisting dan hasil analisis terhadap fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dalam visualisasi peta spasial se-kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin, dengan menggali informasi melalui kuesioner. Responden penelitian ditentukan berdasarkan hasil analisis tipologi wilayah dengan metodologi *cluster random sampling* untuk melihat apakah faktor spasial, seperti sebaran sarana pendidikan di area perkotaan dan pedesaan, memiliki pengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
3. Merumuskan strategi yang dapat meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin.

1.4. Keluaran

Hasil dari kajian ini adalah arahan/rekomendasi kebijakan strategi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Tapin untuk setiap Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilakukan rencana aksi dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada rencana kerja di tahun 2024.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan wilayah, terkait dengan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan ataupun kapabilitas institusional, yang sering diukur dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Perhitungan IPM mempertimbangkan empat (4) aspek, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Dua dari empat aspek tersebut, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pendidikan ataupun pembangunan di suatu daerah.

2.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Sebagai contoh, angka RLS nasional pada tahun 2022 adalah 8,69 yang berarti penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun rata-rata mengenyam pendidikan formal selama 8,69 tahun atau setara antara kelas 2 hingga 3 SMP (sekolah menengah pertama). Perhitungan rata-rata lama sekolah diambil dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang meliputi data terkait partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka rata-rata lama sekolah umumnya diolah pada level administrasi terkecil kota atau kabupaten, dengan disagregasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan, gender, dan pendapatan keluarga. Sementara itu, harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Di Indonesia, HLS dihitung dengan menggunakan data SUSENAS terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perhitungan RLS dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Lama Sekolah Penduduk}_i$$

Keterangan

RLS : Rata-rata Lama Sekolah penduduk di suatu wilayah yang berusia 25 tahun keatas

x_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun keatas

n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk umumnya dikonversi menggunakan ijazah terakhir yang diperoleh responden. BPS menggunakan tabel konversi berikut untuk menghitung RLS:

Tabel 2.1 Konversi Ijazah terakhir menjadi lama sekolah (tahun)

Ijazah Terakhir	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak memiliki ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMALB/MA/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, HLS dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$HLS_a^t = Fk \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i^t}{p_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

p_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

FK : Faktor koreksi

Sebagai catatan, perhitungan RLS dan HLS yang diterbitkan oleh BPS telah memasukkan faktor koreksi yang mempertimbangkan bias dalam pengambilan sampel ataupun kondisi setempat, termasuk peran dan posisi pendidikan non-formal dalam masyarakat lokal. Namun demikian, perlu diketahui bahwa angka RLS diperoleh dari pengalaman pendidikan responden yang berusia 25 tahun ke atas sehingga terdapat bias *generational gap* karena sistem pencatatan ataupun pengumpulan data. Bisa jadi angka RLS suatu daerah rendah karena taraf pendidikan yang dienyam oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di daerah tersebut relatif rendah. Untuk itu, angka RLS perlu dikonfirmasi dengan angka partisipasi murni ataupun jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah.

Jika angka RLS menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, maka HLS menggambarkan potensi kualitas pendidikan di masa mendatang. Gap yang tinggi antara RLS dan HLS menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan pendidikan. Pada negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, gap antara RLS dan HLS cenderung sedikit (bahkan hampir sama), sementara di Indonesia, angka RLS mencapai hampir separuh (50%) dari angka HLS. Strategi untuk mengurangi gap RLS dan HLS yang dicoba diterapkan di Provinsi Sumatera Utara antara lain meliputi alokasi beasiswa pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah karena masalah ekonomi, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa putus sekolah, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat untuk mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan faktor sosial-budaya (Sabrina, dkk., 2022). Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas guru serta sarana dan prasarana pendidikan, termasuk akses dari dan menuju sekolah (Sabrina, dkk., 2022).

2.2. RLS dan Performa Ekonomi Daerah

Rata-rata lama sekolah (RLS) kerap kali dikaitkan dengan performa ekonomi suatu daerah. Kabupaten atau kota yang memiliki RLS tinggi umumnya diasumsikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi hubungan antara RLS dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui angka PDRB (pendapatan domestik regional bruto). Secara nasional, data statistik dari 33 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi angka PDRB di provinsi tersebut (Arif, 2014). Pada penelitian yang lebih detail, RLS dinyatakan berpengaruh secara positif terhadap PDRB di Provinsi Bali (Handayani, dkk., 2016) dan Kalimantan Selatan (Auliana, 2021). Namun demikian, di Provinsi D.I. Yogyakarta, RLS hanya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman saja, dan tidak berpengaruh signifikan pada 4 kabupaten/kota lainnya, termasuk kota Yogyakarta (Putriana dan Aji, 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aktivitas ekonomi. Kabupaten atau kota yang cenderung bertumpu pada kegiatan ekonomi ekstraktif (seperti pertanian ataupun perdagangan hasil pertanian) cenderung memiliki RLS rendah. Kecenderungan ini terbukti pada adanya ketimpangan pendidikan di area pedesaan dan perkotaan. Akses pendidikan yang lebih terpusat di perkotaan menyebabkan angka RLS cenderung lebih tinggi pada area tersebut (Muttaqin, 2018).

RLS juga kerap dikaitkan (secara negatif) dengan tingkat kemiskinan. Makin tinggi RLS di suatu daerah, maka semakin rendah angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini terbukti pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Faritz dan Soejoto, 2020) dan Jawa Timur (Hadi, 2019). Namun demikian, terdapat beberapa studi yang menemukan

bahwa RLS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan jika diukur secara terpisah atau parsial. Sebagai contoh, di Kabupaten Tapin, RLS baru akan berpengaruh signifikan jika dikombinasikan dengan angka pengangguran terbuka (Maulida dan Saleh, 2023). Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Banten (Pradipta dan Dewi, 2020) dan Kalimantan Selatan (Safitri dan Effendi, 2019). Hal ini mengindikasikan pentingnya pendidikan non formal yang tidak masuk dalam perhitungan RLS, karena bisa jadi ketika siswa putus sekolah ataupun tidak melanjutkan sekolah, maka pendidikan non formal dapat memberikan bekal untuk mencari pekerjaan ataupun penghasilan ekonomi.

Di sisi lain, hal ini juga bisa disebabkan oleh belum meratanya kualitas pendidikan dan adanya kesenjangan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, walaupun angka RLS di Kalimantan Selatan meningkat tiap tahun, peningkatan tersebut hanya terpusat di area perkotaan saja. Di pedesaan, yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi, kemungkinan belum tersentuh peningkatan kualitas pendidikan tersebut sehingga tingkat kemiskinannya tidak menurun (Safitri dan Effendi, 2019). Selain itu, perlu dicatat bahwa pada penelitian yang mengkaji hubungan antara RLS dan performa ekonomi, terdapat tantangan pengukuran jeda waktu (*time lag*) yang cukup lama untuk melihat pengaruh pendidikan formal (yang diukur dengan RLS) terhadap kesempatan kerja ataupun peningkatan ekonomi daerah (yang diukur secara agregat).

2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi RLS dan HLS

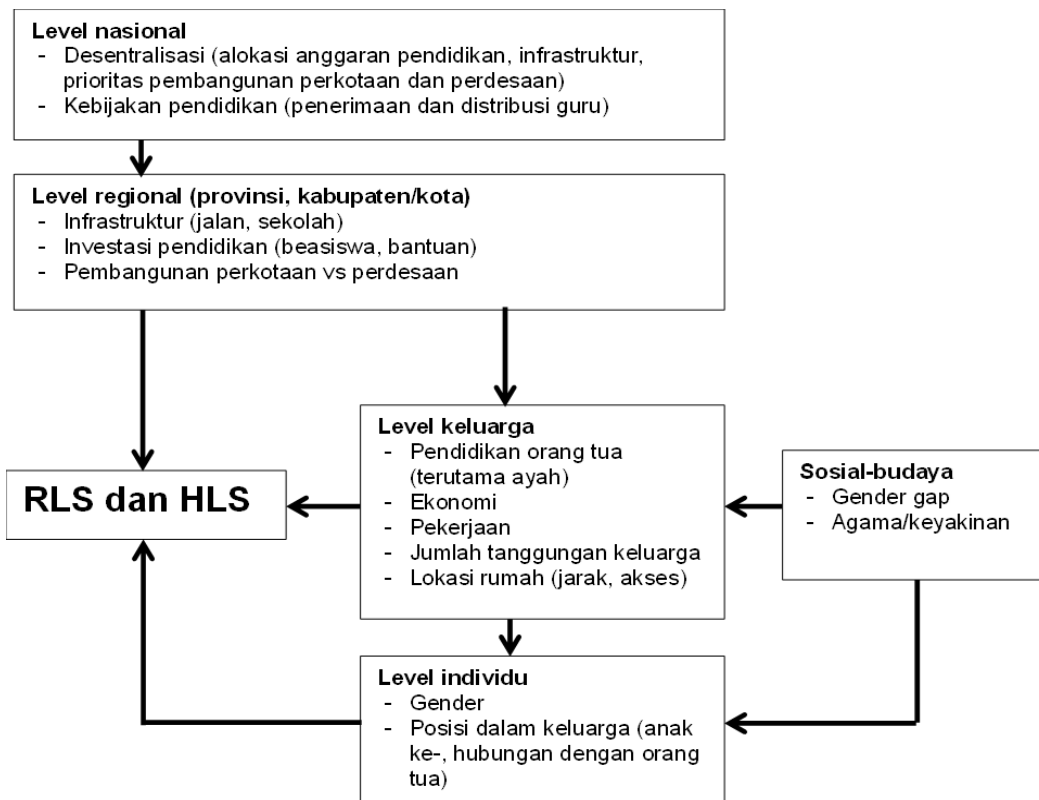
Tinggi rendahnya angka RLS dan HLS dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya, lihat Muttaqin dkk, 2017) pada berbagai level atau skala (Gambar 1). Pada level nasional, kebijakan desentralisasi (terkait alokasi anggaran pendidikan, infrastruktur, dan prioritas pembangunan perkotaan dan pedesaan) serta kebijakan pendidikan, terutama terkait penerimaan dan distribusi guru, terbukti mempengaruhi angka RLS (Rony, 2016; Muttaqin dkk, 2016). Pada level regional (provinsi atau kabupaten/kota), realisasi anggaran dan investasi di bidang pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan RLS (Rony, 2016; Nurmutiazifah dan Yuniasih, 2019; Riyadi dan Hendajany, 2023). Di Kabupaten Banjar, strategi peningkatan RLS mencakup (1) bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya transportasi dari dan ke sekolah, (2) penyelenggaraan pendidikan non formal, (3) penambahan sekolah tingkat menengah (setara SMP dan SMA), serta (4) distribusi guru (Yamin, dkk., 2015).

Level keluarga memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap RLS dibandingkan faktor pada level regional maupun nasional (Muttaqin, 2018). Hal ini karena keputusan bersekolah umumnya diambil pada level keluarga. Sebagai contoh, orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung akan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pula (Noël dan de Broucker, 2002). Dalam hal ini, pendidikan

ayah memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan ibu (Lin, 2021). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemegang keputusan utama yang umumnya adalah laki-laki atau ayah. Keluarga berpenghasilan menengah ke atas dan orang tua yang memiliki pekerjaan 'bergengsi' juga cenderung memprioritaskan pendidikan bagi anak-anaknya (Björklund, 1994). Di Kabupaten Banjar, lama sekolah cenderung rendah pada keluarga yang tergolong miskin dan memiliki banyak beban tanggungan (misal: anak lebih dari 2), sehingga tidak mampu menanggung biaya transportasi ke sekolah, terutama jika jarak rumah dan sekolah cukup jauh (lebih dari 3 km) (Yamin, dkk., 2015).

Perlu diingat bahwa keputusan terkait pendidikan pada level keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, terutama terkait gender dan agama. Di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki, sehingga angka RLS bagi anak perempuan cenderung lebih rendah (Amin dkk., 2019; Nurmutiazifah dan Yuniasih, 2019). Di sisi lain, penelitian di negara-negara berkembang di Afrika menunjukkan adanya hubungan antara faktor agama (yang termanifestasi pada keyakinan pro-kelahiran dan pro-pernikahan) dengan tingkat putus sekolah, terutama untuk anak perempuan (yang akhirnya mempengaruhi RLS) (Takyyi dan Adai, 2002; Kim dan Jun, 2022). Tingginya angka pernikahan dini juga terdeteksi di Kalimantan Selatan, yang berhubungan erat dengan rendahnya lama sekolah serta kentatnya keyakinan masyarakat untuk menghindari pergaulan bebas (Ratnasari, dkk., 2021).

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan secara interseksional, sehingga secara umum terdapat kecenderungan pada level individu bahwa lama sekolah akan lebih rendah pada anak perempuan, tinggal di desa, memiliki banyak adik (terutama adik laki-laki), dan orang tua (terutama ayah) yang berpendidikan rendah (Lin, 2021).



Gambar 2.1. Kerangka Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi RLS dan HLS

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori tersebut, kajian ini menggunakan indikator angka putus sekolah dan keputusan tidak melanjutkan sekolah untuk menganalisis angka RLS dan HLS di Kabupaten Tapin. Lebih lanjut, angka RLS dan HLS di Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh:

1. Faktor spasial, yaitu semakin jauh jarak sekolah atau semakin sulit akses ke sekolah ataupun semakin terpencil lokasi suatu wilayah, maka angka RLS dan HLS makin rendah
2. Faktor ekonomi, terutama kemiskinan, mempengaruhi angka RLS dan HLS
3. Faktor sosial budaya, termasuk pernikahan dini dan kecenderungan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren, mempengaruhi angka RLS dan HLS.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan

Kajian “Strategi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin” menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Kombinasi ini memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam dan kontekstual (yang merupakan kelebihan metode kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan et al., 2016), namun tetap objektif dan terukur secara kuantitatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fenomena yang sedang diteliti. Penggunaan metode deskriptif (Arikunto, 2010) dalam kajian ini bertujuan untuk memahami fenomena ataupun dinamika RLS dan HLS di Kabupaten Tapin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sekunder seperti fluktuasi angka RLS, HLS, partisipasi sekolah, IPM, harapan hidup, pengeluaran per kapita, kemiskinan, dan PDRB, baik secara *time series* (longitudinal) 10 tahun terakhir ataupun komparatif melalui *cross-tabulasi* sederhana. Analisis deskriptif tersebut diperkuat dengan analisis spasial melalui pemetaan sebaran ataupun komparasi spasial. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi RLS dan HLS dianalisis secara kualitatif dari data primer, seperti FGD (*focus group discussion*) dengan pemangku kepentingan terkait, wawancara dengan ahli di bidang pendidikan (termasuk staf Badan Pusat Statistik terkait pencatatan), dan kuesioner yang disebarakan terhadap kepala sekolah dan komite sekolah.

Dalam penelitian ini, dilakukan juga studi literatur berdasarkan dokumen resmi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Tapin maupun instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan metode dan pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat menggali informasi yang relevan dari sumber-sumber terkait untuk mendukung analisis dan pemahaman lebih dalam mengenai masalah peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin selama kurun waktu Agustus hingga Desember 2023.

3.2 Unit Amatan

Unit amatan merupakan suatu objek konkrit dimana data dikumpulkan dari objek tersebut (Ihalauw, 2003: 179). Unit amatan dalam penelitian “Strategi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin” adalah seluruh

sekolah yang berada di Kabupaten Tapin yang terdiri dari 13 kecamatan dan 135 Desa atau kelurahan. Penelitian ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, meliputi sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) yang berada dalam naungan dinas pendidikan maupun kementerian agama (Kemenag) Kabupaten Tapin.

Saat ini, terdapat total 261 sekolah yang akan menjadi objek amatan dalam penelitian dengan rincian 197 sekolah dasar sederajat, 43 sekolah menengah pertama sederajat, dan 21 sekolah menengah atas sederajat. Pengamatan di sekolah-sekolah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah.

3.3 Unit Analisis

Analisis pada kajian ini dilakukan secara bertahap, mulai pada unit kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, mengikuti tingkat kedetailan data. Data pada level makro, seperti RLS, HLS, IPM, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita dianalisis pada unit kabupaten/kota. Pada level yang lebih mikro, seperti angka putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, partisipasi sekolah, dan kepadatan penduduk dianalisis pada unit kecamatan. Data yang bersumber dari sekolah, seperti lokasi atau sebaran, keputusan bersekolah, dan rasio guru:murid dianalisis pada level desa. Untuk analisis spasial seperti sebaran dan aksesibilitas terhadap pendidikan, dilakukan analisis pada unit kedetailan dengan skala 1:250.000.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui FGD, wawancara, dan kuesioner yang disebarakan kepada kepala sekolah dan komite sekolah serta data sekunder yang dikumpulkan dari laporan resmi dan publikasi pemerintah terkait pendidikan. Wawancara dan FGD dilakukan dengan Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, UPT Kementerian Agama, dan akademisi. Kuesioner dibagikan melalui form online dan ditujukan untuk setiap kepala sekolah dan komite sekolah di setiap sekolah di Kabupaten Tapin dari jenjang SD, SMP dan SMA. Dari kuesioner yang disebarakan, terdapat 74 kuesioner dari kepala sekolah dan 67 kuesioner dari komite sekolah yang kembali dan memenuhi syarat untuk dapat dianalisis. Kebutuhan data dan metode pengumpulannya diturunkan dari tujuan kajian, seperti yang dituliskan dalam tabel berikut:

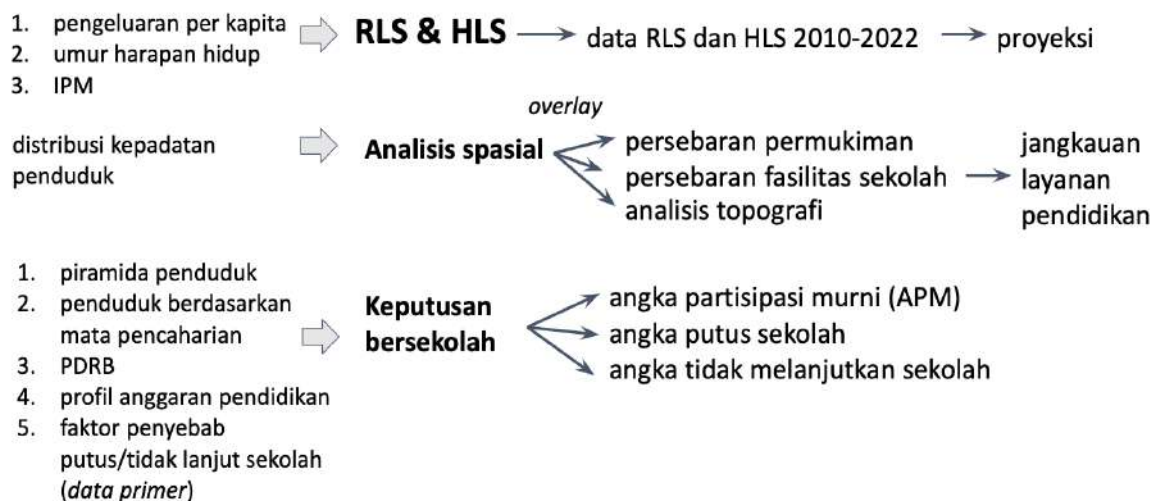
Tabel 3.1 Kebutuhan dan Metode Pengumpulan Data

Tujuan kajian	Data	Metode pengumpulan data	Sumber
Melakukan analisis kondisi eksisting pendidikan di penduduk Kabupaten Tapin	Jumlah dan kepadatan penduduk Jumlah guru Jumlah murid RLS HLS IPM Harapan hidup Pengeluaran per kapita	Survei data sekunder	Data sekunder (Dinas Pendidikan, BPS)
Menganalisis tipologi wilayah sebaran sarana prasarana pendidikan (sekolah, guru, dan murid)	Sebaran permukiman Jumlah dan sebaran sekolah Jaringan jalan	Survei data sekunder	Data sekunder (Dinas Pendidikan, BPS)
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Tapin	Kemudahan transportasi ke sekolah Alasan putus dan tidak melanjutkan sekolah	Survei sekunder Survei primer	Data Podes 2021 Kuisisioner kepada kepala sekolah dan komite sekolah
Menyusun strategi dan rekomendasi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Realisasi anggaran pendidikan Kebijakan pendidikan	Survei sekunder Survei primer	 FGD dan Wawancara

3.5 Metode Analisis Data

Pada kajian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap (Gambar 3.1). Tahap pertama adalah analisis pada skala makro untuk melihat kondisi eksisting pendidikan di Kabupaten Tapin dan membandingkannya dengan kondisi di kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan (*tujuan kajian 1*). Data RLS dan HLS dari tahun 2010 hingga 2022 dijadikan basis proyeksi untuk melihat kecenderungan angka RLS dan HLS pada 10 tahun mendatang. Proyeksi dilakukan dengan asumsi *business-as-usual*. Untuk melengkapi argumen, indikator yang berkaitan dengan RLS dan HLS juga dianalisis, seperti IPM, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita.

Faktor sosial ekonomi



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Tahap kedua adalah melakukan analisis pada skala internal, yaitu membandingkan data antar kecamatan di Kabupaten Tapin. Pada tahap ini, analisis spasial dilakukan berupa pemetaan ataupun visualisasi sebaran fasilitas. Data sebaran permukiman, sebaran fasilitas pendidikan, dan topografi ditumpang-susunkan (*overlay*) untuk mengidentifikasi jangkauan layanan pendidikan serta melihat apakah terdapat pola spasial yang mempengaruhi kondisi pendidikan (*tujuan kajian 2*). Sebagai pembanding, data kepadatan penduduk per kecamatan juga dianalisis untuk melihat apakah konsentrasi penduduk yang umumnya berada di perkotaan mempengaruhi akses dan kondisi pendidikan. Pada tahap kedua ini, angka putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan rasio guru:murid juga dipetakan dan di-*overlay* dengan angka kemiskinan ekstrim per

kecamatan untuk melihat apakah terdapat kecenderungan pola spasial tertentu. Jika data yang sama tersedia pada unit desa, maka analisis spasial dilakukan hingga level kedetailan di tingkat desa.

Pada tahap ketiga, analisis dilakukan secara lebih mendetail untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk keputusan untuk bersekolah (***tujuan kajian 3***) dengan mengacu pada *proxy* angka partisipasi murni, angka putus sekolah, dan angka tidak melanjutkan sekolah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan melalui analisis kuesioner secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari analisis kuesioner dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan pengalaman masyarakat maupun tenaga pendidik terkait keputusan bersekolah dan kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin. Interpretasi analisis kuesioner dilakukan dengan membandingkan dan melihat keterkaitan antara kondisi pendidikan dengan data sektoral lainnya, seperti piramida penduduk, distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian, PDRB, dan profil anggaran pendidikan di Kabupaten Tapin.

3.6 Desain penelitian

Desain penelitian mengacu pada 3 bentuk analisis yang mencakup analisis data sekunder, analisis data primer, dan analisis data spasial (gambar 3.2). Metode analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

a. Analisis Data Sekunder

Analisis ini mencakup gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin berdasarkan data sekunder seperti studi pustaka, laporan penelitian, dan dokumen pemerintahan terkait. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data relevan dalam bentuk tabulasi, diagram, dan grafik. Tujuannya adalah untuk menyajikan data pendidikan yang sudah ada secara komprehensif dan memahami situasi eksisting.

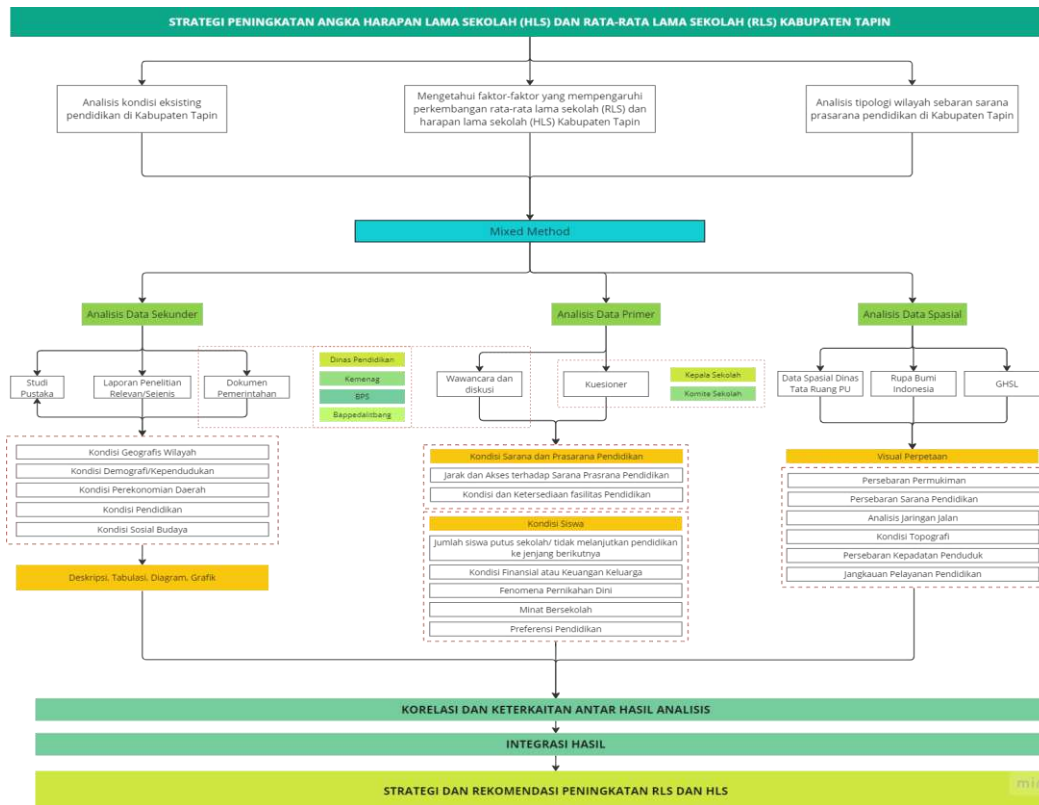
b. Analisis Data Primer

Analisis data primer melibatkan pengolahan data hasil kuesioner yang diberikan kepada responden (Kepala Sekolah dan Komite Sekolah) serta wawancara terstruktur dengan responden terkait (Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, dan UPT Kementerian Agama Kabupaten Tapin). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami data mengenai kondisi pendidikan secara riil,

serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap RLS dan HLS.

c. Analisis Data Spasial

Analisis spasial menggunakan data yang telah dikumpulkan melalui Rupa Bumi Indonesia (RBI) lalu dianalisis menggunakan sistem informasi geografis (SIG) untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi eksisting, persebaran pelayanan, dan jangkauan pelayanan. Dengan analisis data spasial, dapat diperoleh informasi mengenai distribusi geografis pendidikan, serta menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan lokasi geografis di Kabupaten Tapin



Gambar 3.2 Bagan Penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah

BAB 4

GAMBARAN WILAYAH KABUPATEN TAPIN

Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan ibukota Rantau. Sebelumnya Kabupaten Tapin merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian dilakukan pemekaran sehingga memisahkan diri pada tahun 1956 menjadi Kabupaten sendiri. Berikut gambaran wilayah Kabupaten Tapin:

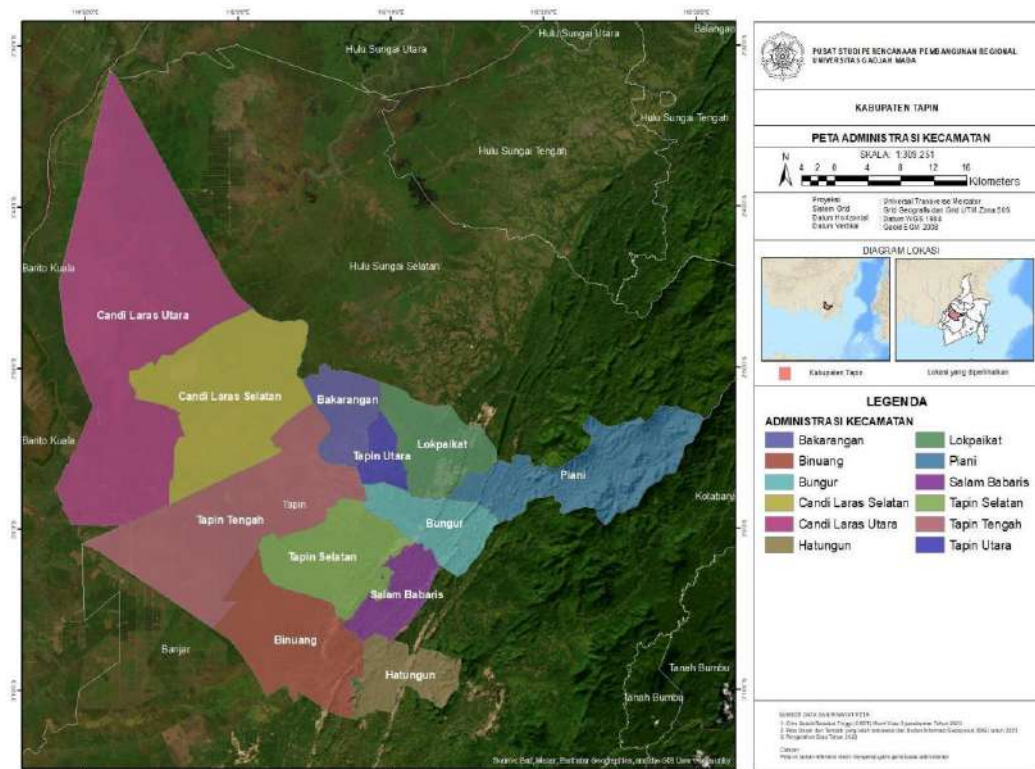
4.1 Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Tapin merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32'43" hingga 3°00'43" LS dan 114°46'13" hingga 115°30'33" BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan dan 126 desa dengan luas wilayah 2.174,95 km² atau 5,8% dari luas Kalimantan Selatan. Berdasarkan luasannya, daerah yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas 681,40 km² atau sebesar 31,33%, sedangkan daerah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas 33,34 km² atau sebesar 1,49% dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin. Berikut merupakan tabel administrasi wilayah per kecamatan di Kabupaten Tapin.

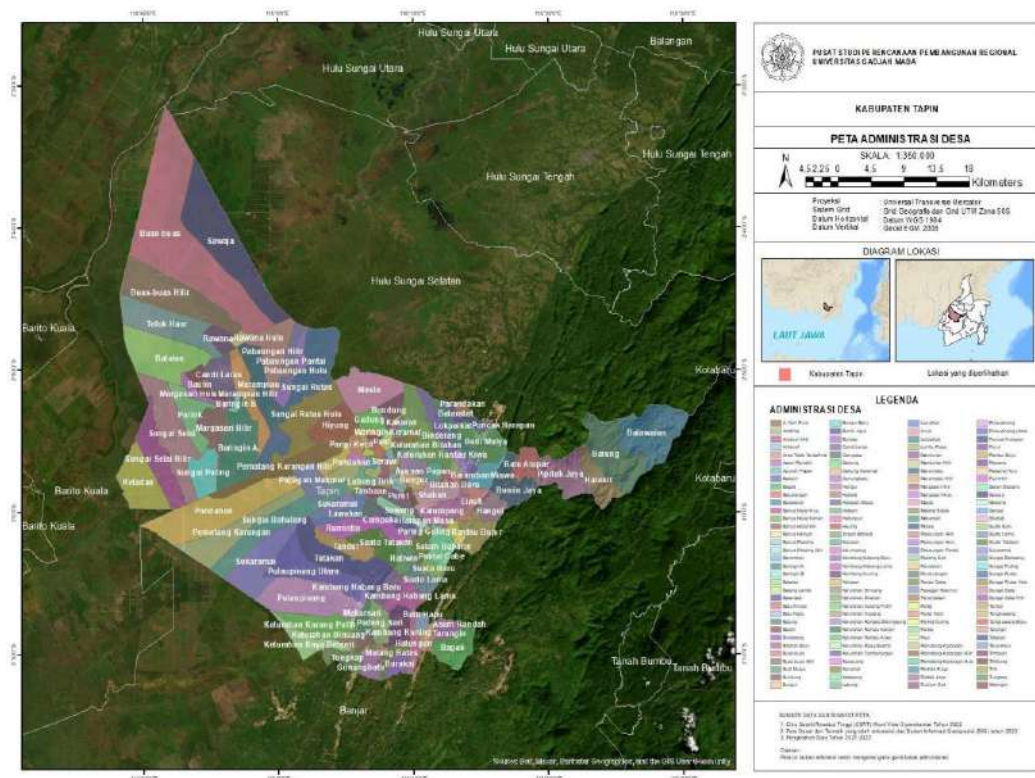
Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tapin

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)
Binuang	Binuang	132,39
Hatungan	Hatungan	95,6
Tapin Selatan	Tambarangan	153,44
Salam Babaris	Salam Babaris	72,8
Tapin Tengah	Pematangan Karangan Hulu	309,56
Bungur	Bungur	91,26
Piani	Miawa	200,09
Lokpaikat	Lokpaikat	93,89
Tapin Utara	Rangda Malingkung	32,34
Bakarangan	Bakarangan	62,57
Candi Laras Selatan	Baringin	249,61
Candi Laras Utara	Margasari	681,4
Kabupaten Tapin		2.174,95

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka 2023; Olahan Penulis 2023



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan
Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kelurahan dan Desa
Sumber: Geoportal Indonesia 2023 (diolah)

4.1.1 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah (82,46%) Kabupaten Tapin berada pada ketinggian 0–7 meter, kecuali pada Kecamatan Piani yang cenderung berbukit. Berdasarkan ketinggiannya, Kabupaten Tapin dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu wilayah yang merupakan dataran tinggi (Kecamatan Hatungun, Piani, Salam Babaris, Bungur, dan sebagian Kecamatan Binuang) dan wilayah yang merupakan dataran rendah (Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Tapin Utara, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara). Kecamatan dengan dominasi kelerengan >40 % paling luas berada di Kecamatan Piani, sedangkan Kecamatan Tapin Tengah merupakan kecamatan yang seluruh wilayahnya berada di kelerengan 0-2 %. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya yang relatif rendah. Tingkat bahaya sedang hingga-menengah hanya sebesar 9% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tapin atau 19.727 hektar, tepatnya pada Kecamatan Piani.

4.1.2 Kondisi Klimatologi

Secara umum, suhu udara di Kabupaten Tapin berada di antara 22 - 42 derajat C pada tahun 2022 dengan rata-rata suhu udara tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 33,0 C. Rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Tapin tahun 2022 berada pada angka 75-85 persen. Pada tahun 2021, terdapat 216 hari hujan di Kabupaten Tapin dan yang terbanyak terjadi di Bulan Desember mencapai 26 hari hujan. Selaras dengan hal tersebut, tercatat bahwa bulan Desember 2021 memiliki penyinaran matahari paling sedikit di Kabupaten Tapin yaitu sebesar 50,5%, sedangkan penyinaran matahari terbanyak berada di bulan April yaitu sebesar 82,5%.

4.1.3 Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari 6 jenis yaitu organosol *gleyhumus*, podsolik merah kuning, *alluvial*, kompleks podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Sebagian besar (73,5%) tanah di Kabupaten Tapin merupakan jenis tanah organosol *gleyhumus*. Jenis tanah ini paling banyak terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah. Sementara itu, jenis tanah dengan persentase paling sedikit (2,57%) adalah jenis kompleks podsolik merah kuning, latosol dan litosol yang terletak di Kecamatan

Kabupaten Tapin memiliki kemampuan tanah yang relatif baik bagi budidaya pertanian. Sebesar 88 % dari Kabupaten Tapin mempunyai tekstur tanah sedang dan 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh

kecamatan di Kabupaten Tapin. selain tekstur tanah, Kabupaten Tapin memiliki tingkat kedalaman tanah yang relatif baik. Sebesar 85 % dari seluruh luas Kabupaten Tapin memiliki kedalaman tanah >30 cm. kedalaman tanah berhubungan dengan kemampuan akar tanaman yang dapat merambat, semakin besar kedalaman tanah maka berpotensi semakin baik tanah tersebut untuk dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.

4.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara dan Sungai Muning yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin. Sungai Negara dan Sungai Muning mengalir dari barat ke utara melalui Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta Tapin Tengah. Dengan dilaluinya Kabupaten Tapin oleh Sungai Negara dan Sungai Muning berdampak pada guna lahan Kabupaten Tapin yang mayoritas berupa rawa, yaitu sebesar 28.234,313 hektar. Sebagian rawa terdapat pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga dipengaruhi oleh drainase tanah di Kabupaten Tapin. Sebesar 11,36% dari Kabupaten Tapin merupakan daerah tergenang permanen dengan luasan 24.715,24 hektar, sedangkan daerah tidak tergenang sebesar 88% dari total wilayah Kabupaten Tapin dengan luasan 192.779,76 hektar.

4.1.5 Guna Lahan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, guna lahan Kabupaten Tapin terbagi menjadi dua peruntukan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai-nilai sejarah, sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Di Kabupaten Tapin, 93% dari total wilayahnya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Tutupan lahan terbesar (72,8%) di Kabupaten Tapin merupakan perkebunan dan pertanian lahan basah.

4.2 Demografi

Demografi merupakan pencatatan kependudukan berdasarkan umur, jenis kelamin, perkawinan, distribusi, kematian dan migrasi. Aspek demografi berpengaruh terhadap pembangunan, salah satunya data kuantitas, kualitas, dan distribusi penduduk dapat digunakan untuk merencanakan fasilitas pendidikan di suatu daerah. Berdasarkan data dari

Kabupaten Tapin dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Tapin adalah 194.628 jiwa dengan penduduk laki-laki sejumlah 98.346 dan perempuan sebesar 96.282 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2018	2019	2020	2021	2022
Binuang	31.298	31.687	31.258	31.683	32.191
Hatungan	9.285	9.438	9.256	9.338	9.545
Tapin Selatan	19.171	19.233	20.369	20.622	20.928
Salam Babaris	12.804	12.977	11.858	11.942	12.055
Tapin Tengah	19.792	19.984	21.195	21.583	22.030
Bungur	13.682	13.896	13.246	13.419	13.627
Piani	5.687	5.703	5.770	5.813	5.871
Lokpaikat	10.330	10.474	11.580	11.882	12.221
Tapin Utara	26.030	26.283	25.396	25.628	25.925
Bakarangan	9.675	9.769	10.047	10.200	10.381
Candi Laras Selatan	12.794	12.829	12.362	12.396	12.459
Candi Laras Utara	17.102	17.149	17.138	17.245	17.395
Kabupaten Tapin	189.668	191.441	191.495	193.772	196.650

Sumber: RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (diolah)

4.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan kebutuhan fasilitas sosial termasuk pendidikan. Jika dibarengi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas, pertumbuhan penduduk dapat menjadi modal pembangunan daerah dengan bertambahnya tenaga kerja terdidik. Berdasarkan data Kabupaten Tapin Dalam Angka, jumlah penduduk Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023 dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2018-2019 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin adalah 0,93%, namun pada tahun 2019-2020 hanya 0,028% yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun selanjutnya, yaitu 2020-2021, pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin mulai meningkat drastis sebesar 1,189% dan pada tahun 2021-2022 pertumbuhan penduduk meningkat jadi 1,485%.

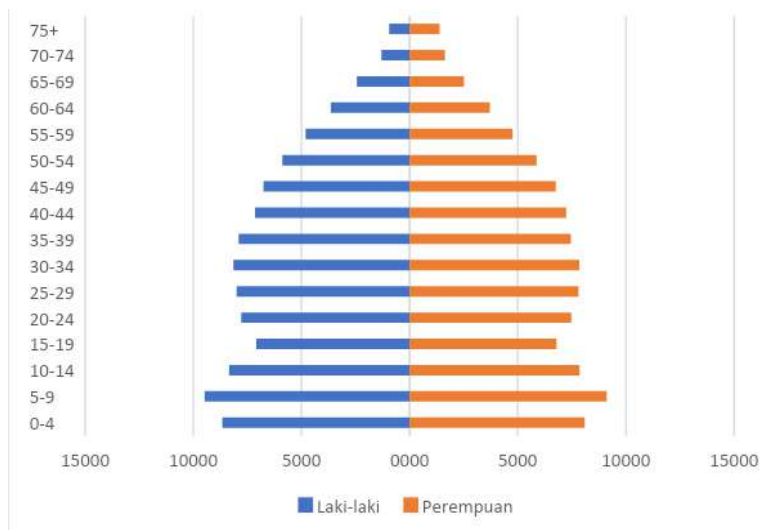
4.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas daerah acuan. Kabupaten Tapin memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata per kecamatan (Tabel 2.6 dan Gambar 2.4). Pada tahun 2022, Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Tapin utara, yaitu 801,64 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu 25 jiwa/km². Kepadatan penduduk tinggi di Kecamatan Tapin Utara dapat dijelaskan dari konsentrasi fasilitas publik yang dapat menjadi pusat-pusat permukiman.

4.2.3 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan

Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan, yang umumnya dinyatakan dalam 1 penduduk laki-laki per 100 perempuan. Pada tahun 2022, *sex ratio* Kabupaten Tapin adalah 102,47 (98.346 penduduk laki-laki berbanding 96.282 penduduk perempuan). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Tapin memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Dependency ratio atau rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia non-produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia diatas 65 tahun) dengan usia produktif (usia 15-65). Angka *dependency ratio* di Kabupaten Tapin pada tahun 2022 sebesar 46,5%, yang mengindikasikan bahwa pada 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk non produktif. Hal ini dapat dijelaskan dari piramida penduduk Kabupaten Tapin yang berbentuk konstruktif (gambar 2.5). Banyaknya penduduk usia produktif dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Tapin. Di satu sisi, banyaknya penduduk usia produktif, jika dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, dapat berpotensi meningkatkan sumber daya yang manusia yang berkualitas yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi ekonomi. Di sisi lain, banyaknya penduduk usia produktif juga dapat menjadi tantangan berupa penyediaan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja agar tidak menganggur.



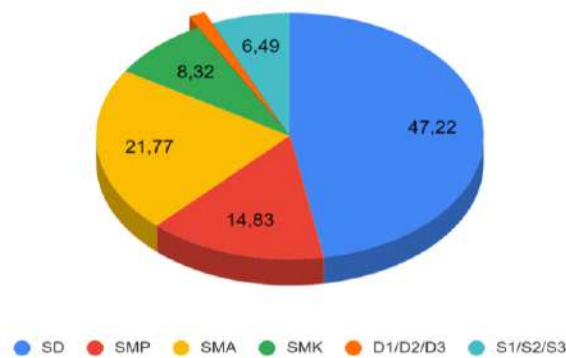
Gambar 4.3 Piramida Penduduk Kabupaten Tapin

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2023 (diolah)

4.2.4 Penduduk Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang sedang bekerja, sedang tidak bekerja namun memiliki pekerjaan, dan pengangguran. Penduduk angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Di Kabupaten Tapin, jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tapin berjumlah 84.706 jiwa, lalu pada 10 tahun setelahnya meningkat sebanyak 21% menjadi 103.316 jiwa. Peningkatan angkatan kerja ini selaras dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapin selama 10 tahun terakhir.

Dari 103.316 penduduk angkatan kerja, 47,22% memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat dan hanya 7,86% yang memiliki ijazah jenjang perguruan tinggi (D1/D3 hingga sarjana. Angka ini Jenjang mencerminkan bagaimana kualitas sumberdaya di Kabupaten Tapin. Angkatan kerja lulusan SD/ sederajat cenderung memiliki keahlian yang lebih rendah dari pada penduduk yang lulusan SMA/ sederajat maupun perguruan tinggi. Peningkatan pendidikan masyarakat Kabupaten Tapin menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Tapin. Banyaknya angkatan kerja yang memiliki ijazah tertinggi sekolah dasar dapat berarti bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor ekstraksi. Umumnya, lulusan perguruan tinggi memiliki potensi lebih tinggi untuk bekerja di sektor industri hingga kreatif.



Gambar 4.4 Grafik Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

4.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK merepresentasikan kontribusi penduduk dalam suatu wilayah terhadap kegiatan ekonomi. TPAK dihitung dengan melihat persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Besarnya penduduk angkatan kerja di suatu daerah, jika tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja, dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Peningkatan angka TPAK mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut semakin banyak penduduk yang terserap lowongan kerja, sedangkan penurunan TPAK mengindikasikan banyak penduduk yang menjadi pengangguran maupun diberhentikan dari tempat kerja. Pada 10 tahun terakhir, TPAK Kabupaten Tapin cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012-2017, TPAK kabupaten Tapin meningkat dari 67,52% hingga 71,92%, sementara di tahun 2017-2019 menurun hingga mencapai 69,30%, yang kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selanjutnya, pada Tahun 2019-2022, TPAK Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dari 69,30% menjadi 70,31%.

Angka TPAK berkaitan dengan jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tapin. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Pada tahun 2012, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Tapin adalah 79.042 jiwa, yang kemudian meningkat 25,2% menjadi 99.027 pada tahun 2022. Pertumbuhan penduduk yang bekerja lebih besar daripada pertumbuhan angkatan kerja, yang mengindikasikan adanya penyerapan kerja yang signifikan dari tahun ke tahun.

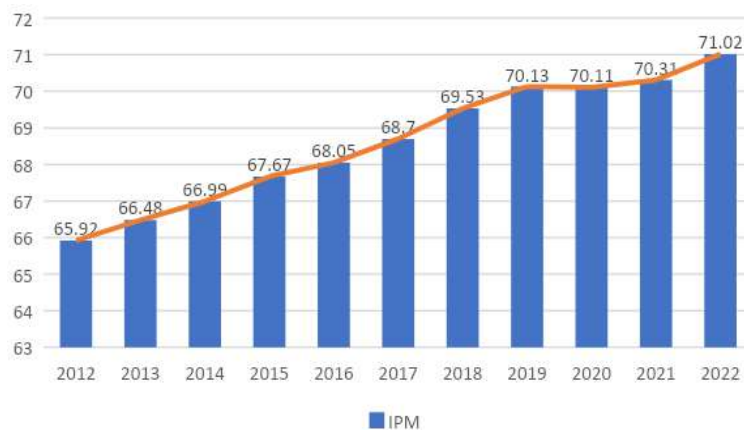
4.2.6 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran di Kabupaten Tapin memiliki tren perkembangan yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 5.664 jiwa turun drastis menjadi 859 jiwa di tahun 2015. Sementara itu, tahun 2015 hingga 2017

terjadi peningkatan drastis jumlah pengangguran menjadi 4301 jiwa. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya pengangguran, hal itu terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja yang ada (Sirait & Marhaeni, 2013)

4.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

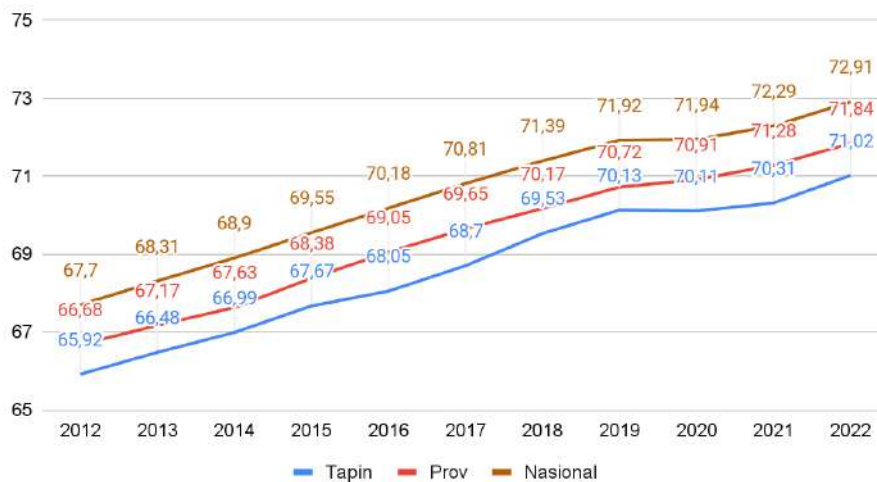
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan yang diukur melalui indikator pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. IPM Kabupaten Tapin pada 10 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 65,92 pada tahun 2012 menjadi 71,02 di tahun 2022 (Gambar 2.10). Sejak tahun 2019, IPM Kabupaten Tapin masuk dalam kategori tinggi karena memiliki nilai lebih dari 70.



Gambar 4.5 IPM Kabupaten Tapin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2023 (diolah)

Walaupun IPM di Kabupaten Tapin meningkat dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Tapin (71,02) masih di bawah IPM provinsi (71,82) maupun nasional (72,91). Pada skala provinsi, IPM Kabupaten Tapin berada pada peringkat 5 dari 13 Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, dimana peringkat satu diduduki oleh Kota Banjarbaru. Pada skala nasional, Kabupaten Tapin berada pada peringkat 242 dari 549 kabupaten/kota.

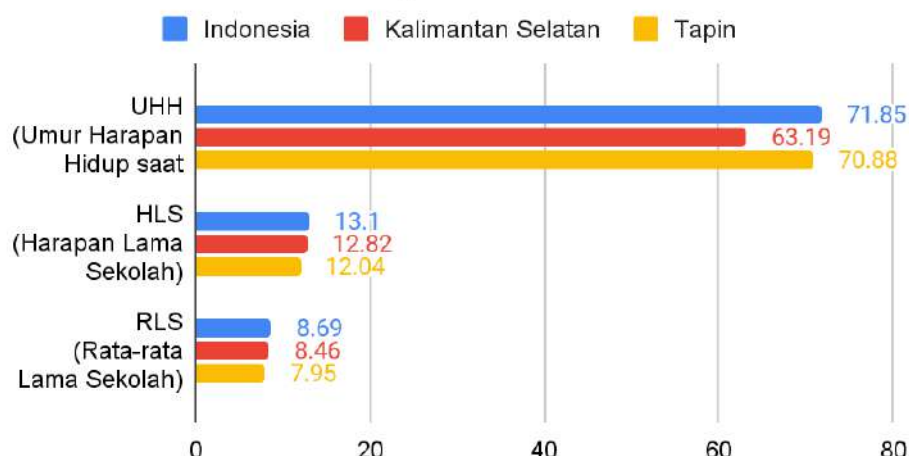


Gambar 4.6 Grafik Perbandingan IPM

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2023 (diolah)

Namun demikian, jika dilihat berdasarkan komponen pembentuk IPM, Kabupaten Tapin tidak selalu berada di bawah rata-rata provinsi ataupun nasional. Dalam perhitungan IPM, terdapat tiga dimensi, yaitu kesehatan (umur harapan hidup/UHH), pendidikan (harapan lama sekolah/HLS dan rata-rata lama sekolah/RLS), serta ekonomi (pengeluaran per kapita), sesuai dengan arahan dari United Nations Development Programme (UNDP). Nilai harapan hidup Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan, walaupun masih lebih rendah dari angka nasional. Sementara itu, angka pengeluaran per kapita Kabupaten Tapin lebih tinggi dari rata-rata nasional walaupun masih lebih rendah dari pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi untuk meningkatkan angka RLS dan HLS Kabupaten Tapin, yang keduanya berada di bawah rata-rata angka provinsi dan nasional. Pada konteks Kabupaten Tapin, peningkatan RLS dan HLS akan dapat memberikan efek positif yang lebih besar terhadap peningkatan IPM.

Perbandingan Komponen IPM Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat serta Dimensi Pengetahuan Tahun 2022



Gambar 4.7 Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

4.3 Kondisi Pendidikan

4.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata waktu atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (RLS) dapat mengindikasikan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh suatu penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai RLS maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Sebagai contoh, tamatan SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamatan SMP diperhitungkan selama 9 tahun, sedangkan untuk tamatan SMA diperhitungkan lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

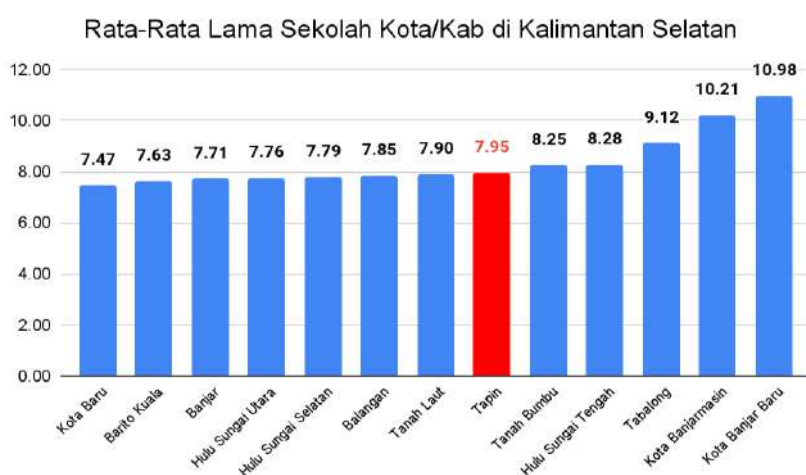
Tabel 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	6,62	6,73	6,84	6,99	7,17	7,43	7,44	7,53	7,54	7,75	7,76	7,77	7,95
Kalimantan Selatan	7,25	7,37	7,48	7,59	7,6	7,76	7,89	7,99	8	8,2	8,29	8,34	8,46
Nasional	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten tapin sebesar 7,95. Artinya lama waktu sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Tapin usia 25 tahun ke atas kurang lebih sekitar 7,95 tahun atau setara duduk di bangku sekolah menengah pertama. Angka ini menempati posisi

keenam dari 13 kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi masih jauh dari rata-rata provinsi yakni sebesar 8,49 dan rata-rata Nasional sebesar 8,69. RLS di Kabupaten Tapin, jika ditinjau dari peringkat nasional, masih tergolong cukup rendah. Kabupaten Tapin berada pada peringkat 273 dari 548 kabupaten di seluruh Indonesia. RLS tertinggi di Indonesia adalah Kota Banda Aceh dengan angka 13,03 atau rata rata penduduk di Kota Banda Aceh minimal menamatkan sekolah pada jenjang Diploma 1. Adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara Kabupaten Tapin dengan angka RLS nasional menuntut adanya perbaikan dalam hal kualitas pendidikan.



Gambar 4.8 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023

4.3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu representasi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan atau harapan lamanya tahun bersekolah yang dapat dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk dengan usia 7 tahun ke atas. Sama seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) juga merupakan salah satu indikator penting penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk dalam dimensi pengetahuan.

Tabel 4.4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	10,32	10,53	10,74	10,95	11,17	11,21	11,24	11,52	11,85	11,86	11,94	11,95	12,04
Kalimantan Selatan	10,86	11,14	11,54	11,67	11,96	12,21	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82
Nasional	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tapin sebesar 12,04 tahun yang berarti penduduk dengan usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Tapin memiliki kesempatan atau harapan untuk menempuh pendidikan selama kurang lebih 12 tahun atau setara dengan tamat sekolah menengah atas (SMA). Apabila dibandingkan dengan kota/kab lain di Provinsi Kalimantan Selatan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tapin masih relatif tertinggal. Tercatat bahwa HLS Kabupaten Tapin berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten di Kalimantan Selatan dan peringkat 497 dari 548 Kabupaten di seluruh Indonesia. Jika ditinjau dari fungsinya, angka HLS menggambarkan potensi bersekolah, sementara RLS menggambarkan kondisi pendidikan yang telah dilalui. Semakin sedikit *gap* antara HLS dan RLS maka semakin baik kualitas pendidikan yang berada di wilayah bersangkutan.

HLS tertinggi di Indonesia berada pada Kota Banda Aceh dengan angka HLS sebesar 17,01. Dari angka tersebut dapat interpretasikan bahwa masyarakat yang berada di Kota Banda Aceh berkesempatan dapat menempuh pendidikan hingga tamat sarjana/S1. Hal yang sama juga diharapkan terjadi di Kabupaten Tapin, semakin tinggi HLS dan RLS, maka semakin baik pula kualitas pendidikan yang berada pada wilayah tersebut.

4.3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat diartikan sebagai persentase atau proporsi penduduk yang bersekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS digunakan sebagai salah satu indikator tercapainya pembangunan di bidang pendidikan pada suatu wilayah. Semakin tinggi APS di suatu daerah menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut.

Tabel 4.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
APS SD (7-12 Tahun)	99,98	98,83	98,8	98,88	100	100	99,47	99,41	99,38
APS SMP (13-15 Tahun)	97,33	97,35	100	97,17	95,99	94,22	97,25	96,74	97,1
APS SMA (16-18 Tahun)	80,05	73,23	73,4	56,44	56,44	62,97	67,65	68,08	67,81

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (2023)

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tapin APS anak laki-laki cenderung lebih tinggi daripada APS anak perempuan, terutama pada jenjang SMP dan SMA (sementara pada jenjang SD, APS laki-laki lebih rendah daripada perempuan). Hal ini

mengindikasikan adanya ketimpangan gender pada akses terhadap pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika dilihat secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan), APS pada jenjang sekolah dasar mencapai angka 99,38 persen. Angka ini mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, APS pada jenjang SD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APS pada jenjang SMP (97,10 persen) dan jenjang SMA (67,81 persen).

4.3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan jumlah murid pada jenjang tertentu (SD, SMP, SMA) terhadap jumlah penduduk pada usia sesuai jenjang tertentu. Angka partisipasi kasar dapat lebih dari 100 persen karena dimungkinkan ada penduduk yang mengenyam pendidikan yang tidak sesuai dengan jenjang usianya. Seperti pada tahun 2022, APK pada jenjang sekolah dasar mencapai 113,08 yang mengindikasikan bahwa pada 100 penduduk yang berusia 7-12 tahun, terdapat 113 orang yang bersekolah pada jenjang sekolah dasar. Dalam hal ini berarti dimungkinkan ada 13 orang yang mengenyam pendidikan SD padahal usianya tidak masuk ke dalam rentang 7-12 tahun.

Tabel 4.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tapin								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
APK SD (7-12 Tahun)	114,23	113,9	113,13	110,93	114,81	113,04	112,66	114,35	113,08
APK SMP (13-15 Tahun)	86,33	83,37	102,67	86,14	85,96	76,63	86,23	84,52	89,62
APK SMA (16-18 Tahun)	75,61	66,59	60,93	55,56	59,63	68,35	65,08	63,1	64,59

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (2023)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa APK Kabupaten Tapin cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, APK jenjang SMP berada pada angka 86,23 lalu turun menjadi 84,52 pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 89,62 pada tahun 2022. Fluktuasi ini juga terjadi pada jenjang SMA selama tahun 2020 sampai dengan 2022. APK Kabupaten Tapin juga cenderung semakin kecil pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah di Kabupaten Tapin terkait pendidikan masih belum memperlihatkan hasil yang konsisten dari tahun ke tahun.

4.3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan jumlah murid yang bersekolah pada jenjang tertentu sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah keseluruhan kelompok umur tersebut. APM menunjukkan banyaknya murid yang bersekolah sesuai dengan kelompok umurnya. Misalnya, terdapat 90 murid dengan usia 7-12 pada jenjang SD, sementara jumlah penduduk di wilayah tersebut yang berusia 7-12 tahun adalah 100 penduduk, maka APM jenjang SD di wilayah tersebut adalah 90. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 10 penduduk pada usia 7-12 tahun belum dapat mengakses sekolah sesuai jenjang dan umur idealnya. APM di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tapin

Angka Partisipasi Murni (APM)	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(APM) SD (7 - 12 Tahun)	99,07	98,83	98,8	98,88	100	100	98,98	99,41	99,4
(APM) SMP (13-15 Tahun)	63,34	73,56	73,66	80,28	71	72,06	72,2	72,42	72,9
(APM) SMA (16-18 Tahun)	58,17	56,42	51,2	51,73	53,1	58,69	54,79	54,76	54,9

Sumber: BPS Kabupaten Tapin (2023)

APM di Kabupaten Tapin pada jenjang SD memiliki angka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 99,4 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 100 orang penduduk Kabupaten Tapin yang berusia 7-12 tahun, ada sebanyak 99 siswa yang bersekolah sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan. Akan tetapi, APM jenjang SMP dan SMA masih tergolong rendah, yaitu 72,9 untuk SMP dan 54,9 untuk SMA di tahun 2022. Dari hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tapin dapat mengakses jenjang pendidikan sekolah dasar, namun untuk jenjang SMP dan SMA, masih belum dapat diakses secara optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sekolah, aksesibilitas, jangkauan pelayanan, kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, ataupun motivasi belajar. Semakin tinggi APM di Kabupaten Tapin, maka semakin tinggi pula kualitas tingkat pendidikan di wilayah tersebut.

4.3.6 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan angka yang merepresentasikan banyaknya penduduk di suatu wilayah yang berhenti bersekolah pada jenjang tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Tapin antar kecamatan masih tergolong tinggi. Alasan cukup tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Tapin disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan data

Dapodik Kabupaten Tapin Tahun 2020, siswa putus sekolah di Kabupaten Tapin disebabkan oleh faktor ekonomi, membantu orang tua, motivasi bersekolah, sulitnya akses, dan pernikahan dini. Penurunan angka putus sekolah memerlukan strategi yang bersifat lintas sektor karena dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 4.8 Jumlah APS dan ATS di Kabupaten Tapin

KECAMATAN	APS /ATS		Jumlah	Pendidikan Akhir (Lulus)			Pendidikan Akhir (Tidak Lulus)			Alasan putus sekolah			
	L	P		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Budaya	Faktor Spasial
Bakarangan	60	38	98	52	8	-	36	1	1	41	6	13	0
Binuang	28	25	53	24	16	-	12	-	-	28	4	0	0
Bungur	51	41	92	75	12	-	5	-	-	85	3	4	0
Candi Laras Selatan	27	22	49	29	7	-	-	3	9	-	-	-	-
Candi Laras Utara	36	47	83	58	17	-	8	-	-	77	7	0	0
Lokpaikat	23	28	51	33	9	-	9	-	-	24	12	12	3
Hatungun	26	10	36	17	16	-	3	-	-	15	21	0	0
Piani	42	35	77	47	10	-	20	-	-	65	12	0	0
Salam Babaris	11	4	15	3	-	-	12	-	-	12	0	0	0
Tapin Selatan	53	48	101	68	13	0	20	0	0	54	27	27	0
Tapin Tengah	80	69	149	125	9	-	15	-	-	30	6	72	0
Tapin Utara	12	3	15	8	3	-	4	-	-	8	6	1	0
TOTAL	449	370	819	539	120	0	144	4	10	439	104	129	3

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin (2020)

4.3.7 Fasilitas Pendidikan

Di Kabupaten Tapin, fasilitas pendidikan terbagi menjadi 2 satuan pendidikan yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal merupakan satuan pendidikan yang harus ditempuh melalui sekolah dengan rentang waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenjangnya. Pendidikan formal dapat berupa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal merupakan satuan pendidikan yang ditempuh di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bimbingan belajar yang tidak terikat dengan lembaga pendidikan formal. Beberapa contoh sekolah

informal di Kabupaten Tapin seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Hingga saat ini terdapat 197 SD/ sederajat yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin dengan rincian 178 Sekolah Dasar (SD), 17 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Sekolah Dasar luar biasa (SDLB). Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat terdapat sejumlah 27 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 14 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 2 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Fasilitas pendidikan jenjang SMP/ sederajat tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tapin, atau setidaknya terdapat 1 SMP/ sederajat di tiap kecamatan. Fasilitas pendidikan jenjang SMA/ sederajat hanya terdapat di 9 dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapin. Total terdapat 9 Sekolah Menengah Atas (SMA), 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 7 Madrasah Aliyah (MA). Terdapat 3 kecamatan yang sama sekali tidak memiliki fasilitas pendidikan jenjang SMA/ sederajat di wilayahnya, yaitu Kecamatan Bungur, Lokpaikat, dan Bakaragan. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa angka RLS Kabupaten Tapin sebesar 7,95 yang mencerminkan kelas 2 SMP/ sederajat. Terdapat kemungkinan sejumlah siswa memutuskan tidak melanjutkan ke SMA/ sederajat karena kesulitan akses fasilitas pendidikan.

Tabel 4.9 Jumlah Fasilitas Pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			TOTAL	Sekolah Menegah Pertama			TOTAL	Sekolah Menegah Atas				TOTAL
		SD	MI	SDL B		SMP	MTS	SMPL B		SMA	SMK	MA	SMALB	
Jumlah		178	17	2		27	14	2		9	3	7	2	
1	Binuang	22	2	1	25	5	3	2	10	3	1	1	1	6
2	Hatungun	11	0	0	11	1	1	0	2	0	0	1	0	1
3	Tapin Selatan	21	3	0	24	1	3	0	4	1	1	1	0	3
4	Salam Babaris	12	0	0	12	2	1	0	3	1	0	1	0	2
5	Tapin Tengah	21	6	0	27	3	0	0	3	1	0	0	0	1
6	Bungur	13	1	0	14	2	0	0	2	0	0	0	0	0
7	Piani	10	0	0	10	2	0	0	2	1	0	0	0	1
8	Lokpaikat	8	2	0	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Tapin Utara	18	2	1	21	3	3	0	6	1	1	1	1	4
10	Bakarangan	11	0	0	11	2	0	0	2	0	0	0	0	0
11	Candi Laras Selatan	14	0	0	14	2	0	0	2	1	0	0	0	1
12	Candi Laras Utara	17	1	0	18	3	3	0	6	0	0	2	0	2

Sumber: Dapodik Kabupaten Tapin 2022, Podes Kabupaten Tapin 2021, Dokumen Kemenag Kabupaten Tapin

Tabel 4.10 Fasilitas Pendidikan Sekolah Informal Kabupaten Tapin 2023

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan				Status		Jumlah
		PKMB	SKB	KB	TPA	Negeri	Swasta	
1	Binuang	1	-	5	1	-	7	7
2	Hatungun	1	-	2	-	-	3	3
3	Tapin Selatan	1	-	8	-	-	9	9

4	Salam Babaris	1	-	6	-	-	7	7
5	Tapin Tengah	2	-	7	-	-	9	9
6	Bungur	-	-	3	-	-	3	3
7	Piani	1	-	2	-	-	3	3
8	Lokpaikat	1	-	6	-	-	7	7
9	Tapin Utara	2	1	11	1	1	13	14
10	Bakarangan	2	-	1	-	-	3	3
11	Candi Laras Selatan	-	-	4	-	-	4	4
12	Candi Laras Utara	1	-	4	-	-	5	5
Jumlah		13	1	59	2	1	73	74

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

4.3.8 Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan pengakuan kualitas lembaga pendidikan yang penelitiannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. Akreditasi sekolah dinilai melalui empat komponen yang terdiri dari mutu lulusan, mutu sekolah, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran. Akreditasi sekolah berkaitan erat dengan kualitas sekolah dalam menghasilkan nilai tambah bagi para siswa. Berdasarkan data yang didapat dari Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2020, sekolah dengan akreditasi A di Kabupaten Tapin masih sangat sedikit. Di jenjang PAUD hingga SMP/ sederajat, hanya 16 sekolah yang memiliki akreditasi A. Sebagian besar (139) sekolah memiliki akreditasi B. Yang perlu menjadi perhatian adalah masih banyaknya PAUD dan TK yang belum terakreditasi, yang jumlahnya lebih dari 50 %.

4.3.9 Rasio Tenaga Pendidik

Rasio tenaga pendidik merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan murid. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 17 No 74 Tahun 2018 tentang guru, rasio guru: murid yang ideal adalah 1:20 untuk jenjang SD hingga SMA. Di Kabupaten Tapin, rasio jumlah guru dan murid masih tergolong ideal, dengan rincian rasio guru: murid pada jenjang TK adalah 1:14 sementara pada jenjang SD dan SLTP adalah 1:12. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa rasio guru: murid tersebut juga disebabkan oleh sedikitnya jumlah murid yang bersekolah, sehingga perlu investigasi lebih mendalam terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin.

4.4 Kondisi Ekonomi

4.4.1 PDRB Kabupaten Tapin

Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dapat menggambarkan strukturnya perekonomian suatu wilayah. Pada periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Tapin mengalami

pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 2019-2020 yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Namun demikian, angka PDRB di tahun 2022 jauh melebihi angka PDRB di tahun 2018, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi telah jauh meningkat. Sumbangan PDRB terbesar di Kabupaten Tapin berasal dari sektor pertambangan, yaitu 26,64 % pada tahun 2022. Padahal, guna lahan Kabupaten Tapin didominasi oleh guna lahan pertanian dan perkebunan (72%). Kontribusi ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan justru 'hanya' menyumbang PDRB sebesar 20,45%. Sementara itu, guna lahan untuk aktivitas pertambangan hanya sekitar 2,85%. Hal ini berarti komoditas pertambangan memiliki kontribusi ekonomi lebih tinggi, mengalahkan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tapin.

Di sisi lain, sektor yang paling sedikit menyumbang PDRB adalah pengadaan listrik dan gas (0,11%) dan jasa perusahaan (0,12%). Hal ini menunjukkan bahwa kontributor PDRB di Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sektor ekonomi ekstraktif, sedangkan sektor industri dan jasa masih belum optimal. Struktur ekonomi ini bisa jadi berkaitan dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin karena kegiatan industri dan jasa menuntut kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul daripada aktivitas ekonomi ekstraktif. Dengan demikian, angka RLS dan HLS Kabupaten Tapin yang cenderung rendah perlu ditingkatkan untuk memperoleh kualitas SDM yang handal yang kemudian dapat meningkatkan struktur ekonomi kabupaten.

4.4.2 Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin

Tipologi perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan sektor tertinggal, yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan ekonomi. Penentuan tipologi didasarkan pada perbandingan pertumbuhan ekonomi setiap sektor dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Pada kasus Kabupaten Tapin, pertumbuhan ekonomi setiap sektor akan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kalimantan Selatan. Perbandingan tersebut akan dikelompokkan dalam 4 kategori atau kuadran, yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, dan sektor relatif tertekan.

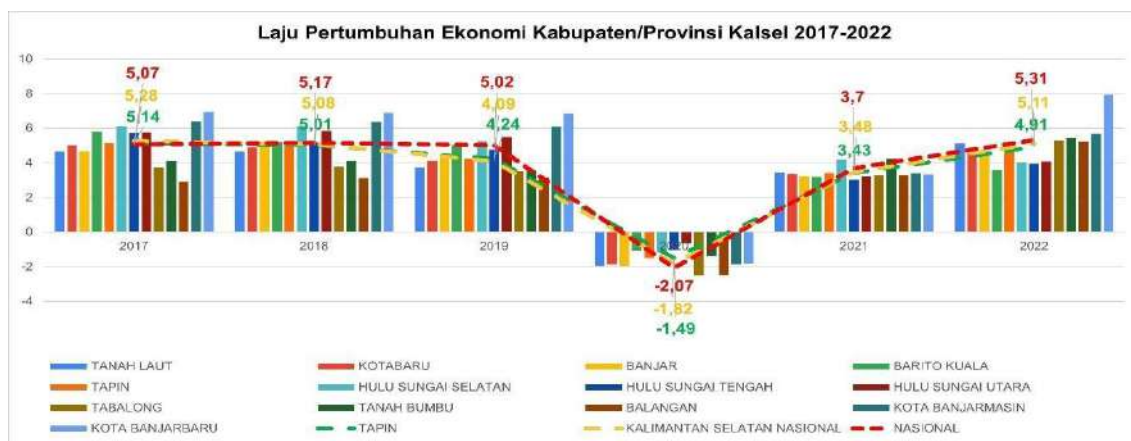
Dari perhitungan yang dilakukan, sektor pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang tergolong maju dan tumbuh pesat. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut lebih unggul dari pada sektor yang sama di kabupaten sekitarnya.

Tabel 4.11 Tipologi Perekonomian di Kabupaten Tapin

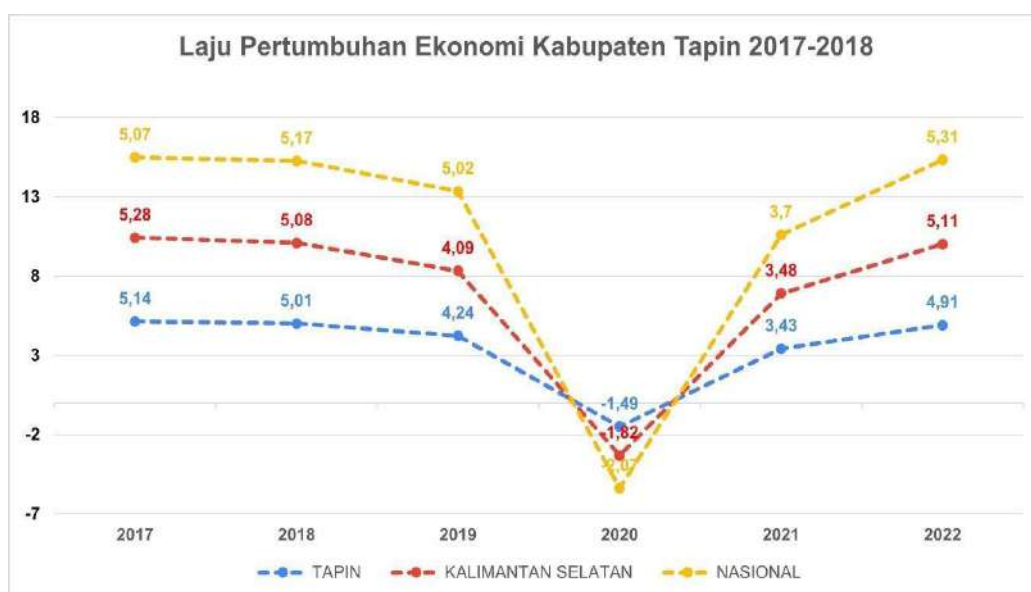
Lapangan Usaha	Kabupaten Tapin		Prov Kalsel		Keterangan
	Laju Pertumbuhan	Pendapatan	Laju Pertumbuhan	Pendapatan	
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1,83%	19,34%	4,35%	13,75%	Sektor Maju tapi Tertekan
B Pertambangan dan Penggalian	27,57%	31,12%	23,71%	22,05%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat
C Industri Pengolahan	4,71%	6,50%	4,59%	13,43%	Sektor Potensial
D Pengadaan Listrik dan Gas	8,99%	0,10%	9,22%	0,14%	Sektor Relative Tertinggal
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,14%	0,31%	7,20%	0,41%	Sektor Relative Tertinggal
F Konstruksi	6,83%	5,54%	6,94%	7,85%	Sektor Relative Tertinggal
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,78%	10,06%	8,15%	9,98%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat
H Transportasi dan Pergudangan	7,67%	3,15%	9,40%	6,50%	Sektor Relative Tertinggal
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,24%	2,29%	7,56%	2,02%	Sektor Maju tapi Tertekan
J Informasi dan Komunikasi	8,21%	3,63%	8,44%	3,62%	Sektor Maju tapi Tertekan
K Jasa Keuangan dan Asuransi	7,02%	1,17%	5,42%	3,49%	Sektor Potensial
L Real Estate	6,62%	1,38%	7,52%	2,25%	Sektor Relative Tertinggal
M,N Jasa Perusahaan	7,01%	0,11%	8,03%	0,69%	Sektor Relative Tertinggal
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,31%	7,45%	4,89%	5,86%	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat
P Jasa Pendidikan	6,24%	5,07%	6,46%	4,66%	Sektor Maju tapi Tertekan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,21%	1,86%	9,60%	2,06%	Sektor Relative Tertinggal
R,S,T,U Jasa lainnya	5,93%	0,92%	7,36%	1,25%	Sektor Relative Tertinggal
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12,10%	100,00%	9,94%	100,00%	

4.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, terutama pada tahun 2019-2020, laju pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,14% menjadi -1,49%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan terjadi di seluruh Kabupaten di Indonesia. Titik balik pertumbuhan ekonomi mulai terjadi pada tahun 2020 sampai 2022, dimana di Kabupaten Tapin terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari -1,49 (2020) menjadi 4,91 (2022). Sayangnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini belum dapat melampaui angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 (5,14). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin jika dibandingkan dengan aspek wilayah yang lebih luas pada tahun 2017 - 2022 masih berada di bawah level provinsi maupun nasional.



Gambar 4.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten se Provinsi Kalsel



Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten se Provinsi Kalsel

4.4.4 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana koefisien gini 0 menunjukkan bahwa pemerataan terjadi secara sempurna, sebaliknya nilai 1 menunjukkan bahwa ketimpangan terjadi secara sempurna. Indeks gini di Kabupaten Tapin memiliki angka lebih rendah daripada provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Tapin lebih baik dibandingkan dengan provinsi maupun nasional.

Tabel 4.12 Indeks Gini Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Selama 5 Tahun

	2018	2019	2020	2021	2022
Tapin	0,281	0,268	0,274	0,289	0,291
Kalimantan Selatan	0,344	0,334	0,332	0,33	0,317
Nasional	0,389	0,38	0,385	0,384	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, indeks gini Kabupaten Tapin (0,291) berada pada urutan 7 terendah. Indeks gini terkecil atau daerah dengan pendapatan yang relatif merata di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (0,0378). Jika dilihat secara nasional, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mempunyai indeks gini di bawah angka nasional (3,81) yang mengindikasikan bahwa seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan cenderung memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang cukup baik.



Gambar 4.11 Grafik Indeks Gini se-Kalimantan Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2023)

4.4.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan cenderung rendah, berada pada posisi nomor 2 dibawah Kabupaten Banjar. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin pada tahun 2023 berada pada angka 0,31% dan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun.



Gambar 4.12 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tapin

4.5 Kondisi Sosial

4.5.1 Budaya Masyarakat

Rendahnya angka RLS dan HLS di Kabupaten Tapin berkaitan dengan angka putus sekolah yang mencapai 83 anak pada jenjang SD dan 102 anak pada jenjang SMP. Berdasarkan data Dapodik Kabupaten Tapin tahun 2022, penyebab putus sekolah ini antara lain adalah pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan keputusan untuk melanjutkan ke pesantren (yang tidak tercatat sebagai pendidikan formal).

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah di Kabupaten Tapin. Junaidi (2019) menyebutkan bahwa pernikahan dini memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap pendidikan dan kesehatan. Jika kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan menurun, maka tingkat pendidikan dan angka harapan hidup di Kalimantan Selatan diperkirakan akan meningkat. Keputusan untuk melakukan pernikahan dini umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang berangkat dari budaya yang menganggap bahwa menikah merupakan salah satu solusi untuk lepas dari permasalahan

ekonomi. Masyarakat yang menganut nilai budaya ini menganggap bahwa menikah dapat mengurangi beban tanggungan keluarga (khususnya bagi keluarga mempelaai wanita) sehingga hak nafkahnya beralih ke suami. Akan tetapi, tidak jarang pernikahan yang dilakukan antara mempelaai pria dan wanita memiliki kondisi ekonomi yang tidak jauh berbeda sehingga malah memperburuk kondisi perekonomian keduanya. Selain itu, budaya religius masyarakat Kabupaten Tapin yang memandang pacaran sebagai perilaku yang kurang terpuji menjadi salah satu alasan untuk melakukan pernikahan dini.

Angka pernikahan dini di Kabupaten tapin mengalami kenaikan pada tahun 2020 yakni sebanyak 93 kasus pernikahan dini dari hanya 9 di tahun sebelumnya. Terdapat beragam penyebab pernikahan dini mulai dari faktor ekonomi, pendidikan orangtua, budaya setempat, hingga pergaulan remaja. Namun hal perlu diperhatikan karena akan berdampak pada banyak hal seperti kesehatan ibu dan bayi, kasus stunting, rendahnya tingkat pendidikan, hingga permasalahan ekonomi kedepannya.



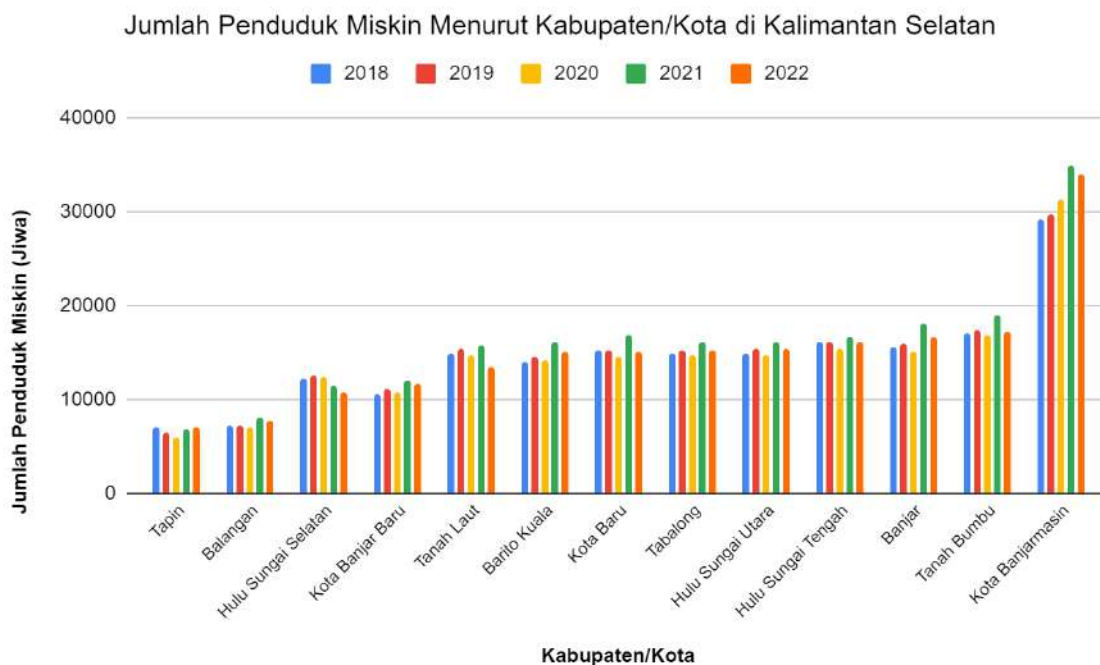
Gambar 4.13 Kondisi Pernikahan Dini di Kabupaten Tapin dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Hasil Kajian Faktor Pemicu Pernikahan Dini dan Kebijakan Penanggulangannya di Kabupaten Tapin Tahun 2022

Selain pernikahan dini, keputusan melanjutkan pendidikan ke pesantren juga menjadi salah satu penyebab siswa putus sekolah di Kabupaten Tapin. Terlebih lagi, terdapat beberapa pesantren yang tidak mengikuti kurikulum nasional, sehingga lama sekolah yang ditempuh oleh santri di pondok tersebut tidak diakui pada pencatatan angka RLS dan HLS. Teknis perhitungan RLS dilakukan berdasarkan ijazah yang dimiliki, sementara kebanyakan pondok pesantren tidak menerbitkan ijazah untuk santrinya, sehingga santri yang bersekolah di pondok pesantren tersebut tidak terdata dalam angka lama sekolah di Kabupaten Tapin.

4.5.2 Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang besaran pengeluarannya selama sebulan berada dibawah garis kemiskinan di daerah tersebut. Atau penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin pada tahun 2018 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 1.026 jiwa dan 57 jiwa di tahun 2022. Jumlah ini tergolong paling rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan.



Gambar 4.14 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Sumber: BPS

4.5.3 Gap antar Kelompok Pengeluaran

- a. Persentase penduduk menurut kelompok umur

Kelompok penduduk di Kabupaten Tapin dengan pengeluaran 20% teratas memiliki persentase penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Sementara itu, 40% kelompok pengeluaran terbawah didominasi oleh penduduk usia non produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok penduduk pengeluaran 40% tengah dan 20% teratas. Tingginya beban ketergantungan diduga menjadi salah satu alasan penduduk berada pada kelompok pengeluaran terbawah.

- b. Kemampuan membaca huruf latin dan huruf lainnya

Kemampuan membaca merupakan keterampilan yang sangat penting bagi seorang individu karena dapat membuka wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemampuan membaca masyarakat Tapin sejauh ini telah mencapai angka 98% hingga 99%, yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Tapin telah mampu memahami bacaan yang menggunakan huruf latin. Sementara itu, kemampuan membaca huruf selain huruf latin mencapai 16% hingga 22%. Dalam hal ini, kelompok penduduk dengan kemampuan pengeluaran 40% terbawah memiliki persentase yang besar (lebih dari kelompok lainnya) dalam memahami bacaan huruf lainnya (non latin).

- c. Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut ijazah terakhir yang dimiliki berdasarkan kelompok pengeluarannya

Masyarakat dengan kemampuan pengeluaran 40% terbawah mayoritas memiliki ijazah terakhir di jenjang SD/ sederajat, diikuti oleh jenjang SMP/ sederajat, dan hanya sedikit (15%) yang memiliki ijazah jenjang SMA/ sederajat. Sementara itu, sebagian besar kelompok masyarakat dengan kemampuan pengeluaran 40% tengah juga memiliki ijazah jenjang SD, namun dengan persentase jenjang SMP dan SMA yang lebih tinggi, yaitu 22,17% dan 25,99%. Pada masyarakat dengan kemampuan pengeluaran 20% teratas, mayoritas (55,06%) memiliki ijazah terakhir di jenjang SMA/ sederajat. Persentase ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk dengan kemampuan pengeluaran menengah hingga bawah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, maka pengeluarannya juga cenderung lebih tinggi.

Tabel 4.13 Persentase Penduduk berdasarkan Kelompok Pengeluaran Dilihat dari Kelompok Umur, Kemampuan Membaca dan Kepemilikan Ijazah

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Umur (dalam persen)			Kemampuan membaca (dalam persen)		Ijazah Terakhir (dalam persen)			
	0-14	15-64	65+	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Tidak punya ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ ke atas
40 Persen Terbawah	30,89	63,71	5,4	98,38	22,48	13,63	49,01	21,75	15,62
40 Persen Tengah	29,94	69,99	5,06	99,04	22,43	17,48	34,35	22,17	25,99
20 Persen Teratas	22,96	74,22	2,81	98,57	16,43	7,16	13,4	24,38	55,06

BAB 5

RENCANA PELAKSANAAN KERJA

5.1. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin meliputi tahapan persiapan, penyusunan laporan pendahuluan, penyusunan instrumen penelitian dan survei, ekspose hasil kajian, serta penyusunan laporan akhir Tahapan tersebut secara rinci dijelaskan berikut ini.

1. Persiapan

Tahapan persiapan ini meliputi:

- a. Persiapan administrasi dan Tenaga Ahli
- b. Orientasi mengenai lingkup pekerjaan
- c. Penyusunan laporan pendahuluan serta metode kerja
- d. Pengumpulan data dan informasi

2. Penyusunan Laporan

Selanjutnya, tahapan penyusunan laporan dilakukan melalui kegiatan berikut ini.

- a. Pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Tapin; profil umum wilayah Tapin; kondisi pendidikan di Kabupaten Tapin meliputi sebaran fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Tapin.
- b. Pengolahan Hasil Survei
- c. Perumusan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin
- d. Ekspose hasil kajian

5.2. PELAPORAN

Laporan-laporan yang dihasilkan dari Pekerjaan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin ini berupa dokumen yang terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan dokumen pelaporan yang berisi latar belakang kegiatan, pendekatan atau metode yang digunakan, rencana kegiatan yang akan dilakukan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan dan tenaga ahli yang dilibatkan. Laporan ini diserahkan dalam bentuk *soft copy*.

2. Laporan Antara

Laporan Antara merupakan dokumen pelaporan yang berisi gambaran umum kondisi daerah dan analisis sementara berdasarkan hasil analisis data sekunder dan hasil survei. Pada tahapan ini dilakukan diskusi bersama Perangkat Daerah terkait untuk memberikan masukan data dan informasi sebagai dasar dalam merumuskan strategi. Laporan ini diserahkan dalam bentuk *soft copy*.

3. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan dokumen pelaporan yang berisi penyempurnaan hasil kajian dari laporan sebelumnya, dilengkapi dengan hasil rekomendasi Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin. Laporan akhir ini merupakan hasil penyempurnaan setelah dilaksanakan ekspose hasil kajian dan diserahkan dalam bentuk *soft copy*.

5.3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pekerjaan penyusunan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama. Adapun rencana kerja dengan jadwal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.
Rencana Jadwal Pelaksanaan Kerja

No	Kegiatan	Agustus		September				Oktober				November				Desember	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Persiapan Tim																
2.	Penyusunan Laporan Pendahuluan																
3.	Presentasi Laporan Pendahuluan (daring)																
4.	Penyusunan instrumen penelitian																
5.	Koordinasi dengan tim surveyor																
6.	Survei Pengumpulan Data																
7.	Pengolahan Data																
8.	Analisis Data																

9.	Penyusunan Laporan Antara																	
10.	Diskusi tim dengan Bappeda																	
11.	Presentasi Draf Laporan Akhir																	
12.	Finalisasi laporan																	

4.4. MOBILITASI TENAGA

Personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan Penyusunan Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah ini terdiri dari Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli, sebagai berikut:

- A. Koordinator Pelaksana
Ahli Perencanaan Pembangunan

- B. Staff Ahli
 - 1. Ahli Perencanaan Pembangunan
 - 2. Ahli Manajemen Pembangunan
 - 3. Ahli Geografi Wilayah
 - 4. Ahli Kebijakan Publik

- C. Asisten
Asisten Perencanaan Pembangunan

Selain tim ahli, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini juga didukung dengan tim sekretariat yang mencakup tenaga administrasi dan tenaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. M., Asani, R. N. C. P., Wattimena, C. R. J., dan Yuniasih, A. F. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*, 593-601.
- Arif, M. N. R. A. (2015). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Signifikan*, 3(1), 81-94.
- Auliana, L. (2021). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli terhadap PDRB di Kalimantan Selatan. Skripsi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat.
- Björklund, A. (1994). The Impact of Family Background on the Returns on and Length of Schooling in Sweden. Dalam: Asplund, R. (eds). *Human Capital Creation in an Economic Perspective*, pp. 95-116. Physica: Heidelberg.
- Faritz, M. N., dan Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1), 16-21.
- Hadi, A. (2017). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *Media Trend*, 14(2), 148-153
- Handayani, N. S., Bendesa, I. K. G., dan Yuliarmi, N. N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan PDRB per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449-3474
- Kim, J., dan Jun, M. (2022). Money, a Drain of Educational Opportunity: A Microregional Study of School Dropouts in Mpigi, Uganda. *Sustainability*, 14(10), 5875.
- Lin, C. (2021). Analysis on Education Acquisition of Rural Women in China — Based on CGSS2017. *Proceedings of 6th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities*, 267 - 274
- Maulida, H. H., dan Saleh, M. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 514-519.
- Muttaqin, T., van Duijn, M., Heyse, L., Wittek, R. (2016). The Impact of Decentralization on Educational Attainment in Indonesia. Dalam: Holz hacker, R., Wittek, R., Woltjer, J. (eds). *Decentralization and Governance in Indonesia. Development and Governance*, vol 2, pp. 79-103. Springer: Cham
- Muttaqin, T., Wittek, R., Heyse, L., dan van Duijn, M. (2017). Why Do Children Stay Out Of School In Indonesia? *The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(2), 93–108.
- Muttaqin, T (2018). Determinants of Unequal Access to and Quality of Education in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), 1-23.
- Noël, S., de Broucker, P. (2002). Intergenerational Inequities. Dalam: Hutmacher, W., Cochrane, D., Bottani, N. (eds). *Pursuit of Equity in Education*, pp. 277-296. Springer: Dordrecht.
- Nurmutiazifah, A., dan Yuniasih, A. F. (2019). Penerapan Model Regresi Data Panel: Determinan Ketimpangan Capaian Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2015-2019. *Prosiding*



- Pradipta, S. A., dan Dewi, R. M. (2020). Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 109-115.
- Putriana, R., dan Aji, R. H. S. (2022). Studi Atas Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rata-rata Lama Sekolah Sebagai Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 31-47.
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., dan Normelani, E. (2021). Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografli Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35-42.
- Rony, M. (2016). Analisis Determinan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2015. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 5(4).
- Riyadi, D. R., & Hendajany, N. (2023). Mean Years of Schooling Inequality and Return on Education: Analising the Main Determining Factors. *Journal of Economics and Sustainability*, 5(1), 43–58.
- Sabrina, R., Manurung, A. I., dan Sirait, B. A. (2022). Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4784-4792
- Safitri L., dan Effendi, M. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 842-851
- Takyi, B. K., dan Addai, I. (2002). Religious Affiliation, Marital Processes, and Women's Educational Attainment in a Developing Society. *Sociology of Religion*, 63(2), 177-193
- Yamin, M., Suyidno, dan Mattiro, S. (2015). Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar. *Laporan Penelitian Bappeda Kabupaten Banjar*



KAJIAN STRATEGI

PENINGKATAN ANGKA
HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
DI KABUPATEN TAPIN

©Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tapin